

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barkatullah, a. H. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Diantha, I. M. (2017). *Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Friedman, L. M. (2011). , *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science*. Bandung: Nusa Media.
- Hosnah, A. U. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Printing.
- Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priansa, D. J. (2017). *Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarma, M. A. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penataan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Singaraja

SKRIPSI

Ariawan, I. W. (2021). Impelementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng. *Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*, 98.

Dita, P. A. (2016). Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan. *Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2.

Widita, I. A. (2018). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MENU MAKANAN TANPA INFORMASI HARGA (STUDI DI PKL KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG). Universitas Negeri Semarang, 28.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Ansyah, M. A. (2019). INFORMASI PRODUK : Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pedagang Kaki Lima di Surakarta. 3.

Bastiana, d. (2019). Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar. *"Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia"*, 382.

Cindy Isabelle Ekak, I. M. (2022). Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pada Rumah Mahan di Kabupaten Badung. *Universitas Udayana*, 27.

Deti Yustina, D. (2019). Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Standar Penyajian F&B (Food and Beverage) Pada Restoran Bali Villa Seminyak. *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7 No. 10*, 3.

Dewi Masitha, T. L. (2022). Perlindungan Konsumen Terkait Harga Barang yang Tidak sesuai Tertera Pada Etalase dan Struk Belanja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1099.

- Febriana, P. R. (2021). Wisatawan Lokal Untuk Berwisata Ke Pantai Penimbangan Singaraja. *Jurnal Akademisi dan Praktisi Pariwisata*, 2.
- Khrisna, I. K. (2017). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar”. *Jurnal Kertha Semaya*, 2.
- Lasas Putri Utami, H. L. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/17 tentang Pencantuman Harga Barang . *Prosiding Ilmu Hukum*, 1034.
- Maharani, A. S. (2018). Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) dan Harga Kasir. *Universitas Udayana*, 3.
- Mansyur, A. d. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Unissulam2 No.1*, 4.
- Pranoto, S. d. (2017). Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen Kurang Mampu. *Jurnal Ilmu Hukum Sebelas Maret 2 No.2*, 8.
- Priyanto, I. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Harga Pada Daftar Menu Makanan Sebagai Kewajiban Pelaku Usaha. *Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No.8* , 7.
- Purba, D. A. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . *Universitas Quality*, 8.
- Putera, A. A. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label dan harga Kasir. *Universitas Udayana*, 10.
- Rianti, N. K. (2017). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal terjadinya hortweighting ditinjau dari undang-undang RI no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *jurnal magister hukum udayana* , 4.
- Ronny Saputra, d. (2020). Kewajiban Mencantumkan Harga Menu Makanan Oleh Pelaku Usaha Kuliner di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Prodi Ilmu Hukum*, 3.

WEBSITE

Puspita, P. (2018, Agustus 24). *bobo.grid*. Diambil kembali dari bobo.id:
<https://bobo.grid.id/read/08924036/pantai-penimbangan-menikmati-pantai-ditemani-angin-sawah-yang-sejuk>

Ruang, T. (2023, April 11). *Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali*. Diambil kembali dari tarubali.baliprov: <https://tarubali.baliprov.go.id/>

